

**KEBIJAKAN MULTIKULTURAL DI AUSTRALIA PADA MASA
KEPEMIMPINAN JOHN HOWARD**

SKRIPSI

Asal	: Hindia	Klasifikasi
Terima Tgl:	<u>26 FEB 2001</u>	320.9
No. Induk :	<u>102.335.229</u>	UTA
		K



Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Dewi Utaminingtyas

NIM. EIA 195 027

Pembimbing :

Prof. DR. Akhmad Khusyairi, MA

NIP. 130 261 689

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2001

PENGESAHAN

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Dipertahankan di depan Panitia Penguji pada

HARI : SELASA
TANGGAL : 6
BULAN : FEBRUARI
TAHUN : 2001
JAM : 08.00-09.00 WIB

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI

KETUA

(Drs. Umaid Rad, MA)

ANGGOTA PENGUJI

1. Drs. Umaid Rad, MA (Ketua)
2. Prof DR. A. Khusyari, MA (Sekreteris)
3. Drs. Nuruddin M. Yasin (Anggota)
4. Drs. A. Habibullah, MSi (Anggota)

SEKRETARIS

(Prof. DR. A. Khusyari, MA)

MENGETAHUI
DEKAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER

Drs. Moch Toerki
NIP. 130 524 632

Tulisan ini saya persembahkan untuk

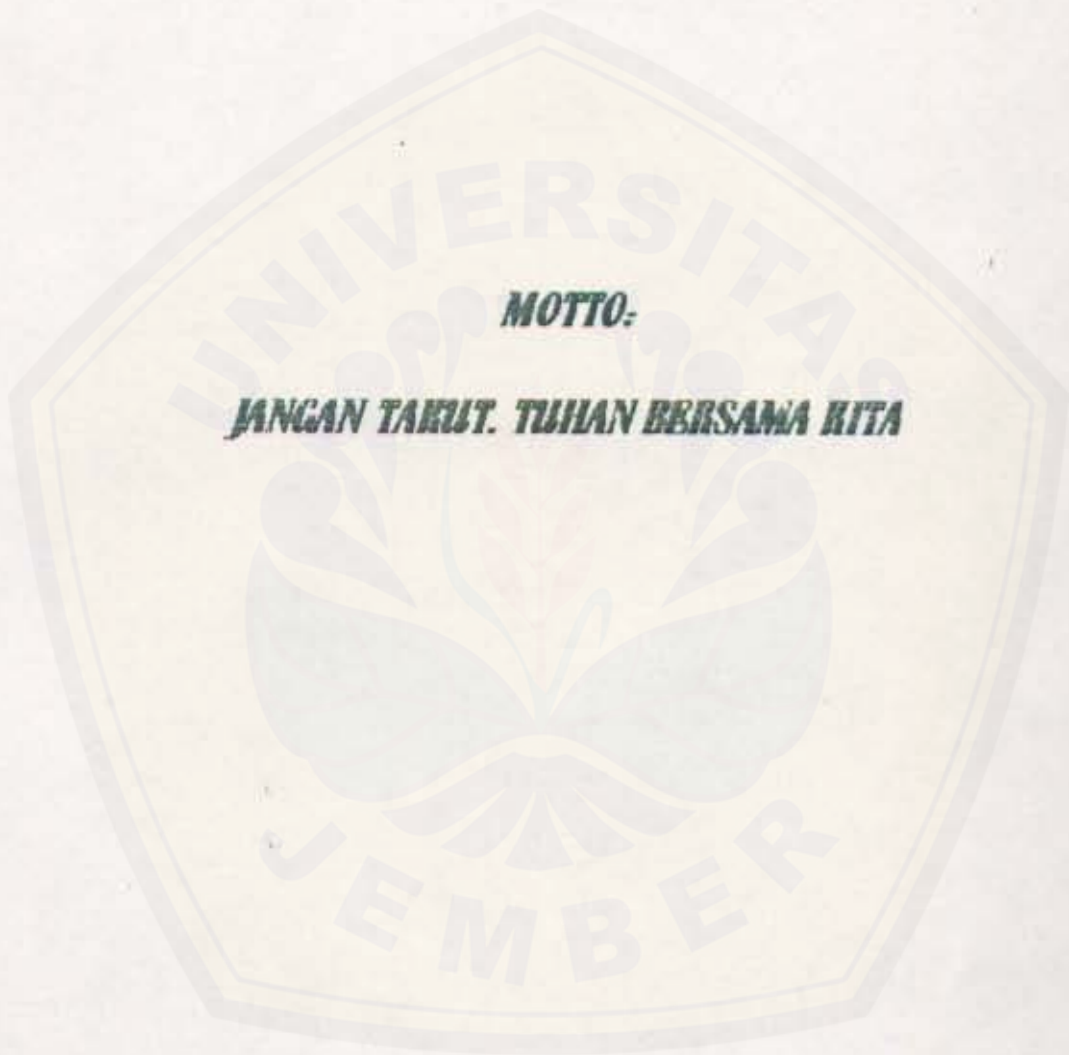
** Mami, atas segala doa, darah, peluh, dan airmata yang*

tercurah untuk putri satu-satunya: dan

** Bapakku tercinta dan satu-satunya yang kumiliki (H.*

Moch Abas Surwi). Thanks, Dad! I always proud of you,

'cos you're still the best man I ever had



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmatnya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis mengambil tema masalah multikultural di Australia di samping untuk menambah wawasan tentang multi kultur di Australia, juga sebagai bahan perbandingan dengan multikultural yang ada di Indonesia maupun di negara-negara lain.

Penulis menyadari adanya kekurangsempurnaan dalam proses penulisan ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih dengan setulus hati kepada:

1. Bapak Prof. DR. Akhmad Khusyairi, MA, selaku dosen pembimbing yang tidak hanya membimbing skripsi saja, tapi lebih banyak sebagai pembimbing spiritual bagi penulis;
2. Bapak Drs. Sjoekron Sjah, SU, selaku ketua jurusan HI;
3. Bapak Prof. M. Turki, selaku dekan FISIP;
4. Bapak Drs. Asrial Aziz, selaku dosen wali;

- 5 Bapak Agus Tri S.Sos, yang telah memberikan banyak masukan dalam BAB I dan telah memberikan banyak sekali bahan-bahan yang sangat penulis butuhkan;
- 6 Para team penguji;
- 7 Para dosen FISIP Unej beserta seluruh civitas akademika;
- 8 Mas Fraser yang rajin mengirim berita tentang Australia dan telah memberi inspirasi pada penulis dalam menentukan judul skripsi serta memberi kemudahan selama penulis berada di Konsulat Australia;
- 9 Bapak Kyai H. Warits, pengasuh PP Bahrul Ulum Kalisat, beserta Ibu Nyai. Terima kasih atas bimbingan Bapak dan Ibu sehingga saya bisa menemukan jawaban atas pertanyaan 'kenapa saya diciptakan?';
- 10 All of my sisters and my brothers, Mbak Latifah, Mbak Lilik, Arifin, and Nazul;
- 11 All of my Uncas and my Unties, Lik Luluk, Budhe Diah, Bu'e, dll yang terlalu banyak untuk disebutkan;
- 12 Bapak Hartoyo, terima kasih sekali jika anda bersedia berjihad;
- 13 Mas Yusuf Aziz, thanks, you've been breaking my heart into pieces;
- 14 Keluarga Bapak dan Ibu Masi, Mas Taufik, Mbak Yuli, Wardi, Wawi;
- 15 My very close friend: Mbak Sri. Thanks for the friendship you've been giving to me;

16 My close friends: Silvi, Helin, Hartoyo, Mas Deri, Teguh, Mas Arif,

Nugi, Rori, Mas Hari dll.

17 Teman-teman HI '95, we've shared our time together.

Jember, 1 Februari 2001

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	6
1.3 Problematika.....	8
1.4 Kerangka Dasar Teori.....	9
1.5 Hipotesa.....	14
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.6.1 Tehnik Pengumpulan Data.....	15
1.6.2 Tehnik Analisa Data.....	16
1.6.3 Pendekatan.....	17
BAB II LATAR BELAKANG KEBIJAKAN	
MULTIKULTURAL DI AUSTRALIA.....	19
2.1 Sejarah Kedatangan Imigran.....	19
2.2 Kebijakan Australia Putih.....	23

2.3 Masa Integrasi	27
2.4 Multikulturalisme	29
BAB III. MULTIKULTURAL DAN NASIONALISME.....	32
3.1 Latar Belakang Pembentukan Nasionalisme di Australia	32
3.2 Nasionalisme dan Hubungannya Dengan Multikultural	38
3.3 Dampak Multikultural Bagi Australia	43
3.4 Beberapa Kelemahan Multikultural	44
BAB IV. KEBIJAKAN MULTIKULTURAL DI AUSTRALIA PADA MASA KEPEMIMPINAN JOHN HOWARD	48
BAB V. KESIMPULAN.....	56
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Australia merupakan negara yang dibangun oleh masyarakat dari berbagai latar belakang bangsa. Masyarakat Australia merupakan masyarakat imigran yang berasal dari berbagai negara dan suku bangsa. Oleh karena itu dalam masyarakat Australia terdapat berbagai etnis, budaya, agama dan latar belakang yang berbeda-beda. Australia dilihat dari latar belakang sejarahnya merupakan benua yang kebanyakan terdiri atas pendatang Eropa sehingga menimbulkan kultur yang tidak jauh berbeda dengan Eropa. Sedangkan secara geografis benua Australia bersebelahan dengan benua Asia, yang mana sebagian besar penduduk di kawasan ini terdiri atas masyarakat kulit berwarna (Asia) yang tentu saja mempunyai kultur dan tingkat perekonomian yang jauh berbeda dengan masyarakat Eropa. Kontras jika dilihat dari sejarah geografi, geografi politik dan ekonomi yang menunjukkan bahwa Australia merupakan bagian dari Asia dan bukan Eropa. Sejarah geografi menunjukkan bahwa pada mulanya benua Australia menjadi satu dengan daratan Asia. Dilihat dari geografi politiknya, batasan teritori lautan Australia berbatasan langsung dengan batasan teritori lautan atau Zone

Ekonomi Eksklusif Asia. Sedangkan dalam bidang ekonomi Australia lebih banyak mengadakan hubungan ekonomi dengan negara-negara Asia.

Australia adalah sebuah benua dengan jumlah penduduk yang kecil yang sebagian besar berpusat pada daerah-daerah yang mempunyai sarana dan prasarana yang memadai. Penduduk Australia yang berjumlah sekitar 18,8 juta pada tahun 2000 atau sekitar sepersepuluh dari jumlah penduduk Indonesia sangatlah kecil jika dibandingkan dengan luas benua Australia itu sendiri. Sebelum tahun 1970-an Australia pernah menjalankan Politik Australia Putih atau White Australia Policy. Politik yang menjaga Australia berpenduduk kulit putih saja dengan menutup pintu rapat-rapat bagi orang Asia. Australia takut negaranya tercemar oleh bangsa kulit berwarna karena sebagai bangsa kulit putih mereka dihindangi rasa *superiority complex* (rasa superior). Warga kulit putih cemas akan penguasaan warga kulit berwarna yang semakin banyak jumlahnya atas warga kulit putih.

Namun sejak berakhirnya Perang Dunia II gemas HAM yang disuarakan oleh PBB yang diantaranya menyangkut tentang persamaan manusia semakin keras. Jadi Australia terpaksa beradaptasi dengan lingkungan dan mengubah kebijakannya sesuai dengan perubahan pemikiran dan pandangan-pandangan baru tentang persamaan manusia.

Disamping itu juga karena Australia mendapat kecaman dari dunia karena pelanggaran HAM dan rasisme. Oleh karena itu pada tahun 1966 Kebijakan Australia Putih dihapuskan. Mulai saat itu imigran dari Asia dan Timur Tengah mulai berdatangan di Australia.

Dengan datangnya imigran dari Asia ini maka masyarakat Australia menjadi semakin majemuk. Agar kemajemukan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dalam masyarakat maka pemerintah Australia menerapkan kebijakan multikultural. Kebijakan multikultural ini mula-mula dirintis oleh PM Whitlam pada tahun 1972. Whitlam memberikan kebebasan kepada setiap etnis untuk mengekspresikan kebudayaan nenek moyangnya. Kebijakan ini diteruskan oleh penggantinya, yaitu PM Fraser yang menekankan pada hak untuk mempertahankan budaya asli tiap-tiap etnis. Sedangkan pada masa PM Hawke dibentuk Kantor Urusan Multikultural (*Office of Multicultural Affairs-OMA*). Hawke berharap bahwa dengan adanya multikultural para imigran diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan Australia.

Prinsip-prinsip multikultural yang terdapat dalam Agenda Nasional antara lain mencakup tiga hak warga Australia antara lain adalah hak untuk mengekspresikan budaya masing-masing etnis, hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan dan kesempatan serta hak untuk menggunakan ketramampilan dan kecakapan. Pada masa kepemimpinan

John Howard hak-hak warga Australia tersebut dijamin melalui kebijakan toleransi rasial yang dikeluarkannya yang isinya antara lain adalah persamaan hak bagi semua warga Australia untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa perbedaan ras, warna kulit serta asal usul. Kebijakan ini merupakan salah satu langkah Howard dalam meneruskan kebijakan multikultural yang telah dirintis para pendahulunya. Didalam kebijakan ini juga ditegaskan tentang proses rekonsiliasi dengan warga Aborigin yang mana hal ini tidak terdapat dalam kebijakan multikulturalisme sebelumnya.

Selanjutnya pada tahun 1997 pemerintahan Howard membentuk Badan Penasihat Multikultural Nasional (National Multicultural Advisory Council-NMAC) yang berfungsi sebagai penasihat pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang menyangkut multikultural serta menekankan bahwa beragam budaya adalah suatu kekuatan pemersatu bagi Australia. Bedanya dengan OMA adalah bahwa OMA memfokuskan pada masalah ekonomi dimana Australia harus mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dari keahlian penduduknya, sedangkan NMAC memfokuskan pada masalah politik dalam negeri Australia yang meletakkan persatuan diatas segalanya.

Kabinet Howard sangat memperhatikan persatuan Australia. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil yang memfokuskan persatuan dan hak-hak warga Australia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji suatu penulisan dengan judul

KEBIJAKAN MULTIKULTURAL DI AUSTRALIA PADA MASA KEPEMIMPINAN
JOHN HOWARD.

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam membahas permasalahan harus ditentukan ruang lingkup agar pembahasan masalah berkembang kearah sasaran yang tepat. Tujuannya adalah agar dalam pembahasan nanti tidak keluar dari jalur dan kerangka masalah yang telah ditentukan

Menurut Joseph Frankel ada titik-titik tertentu kejadian history adalah unik karena itu semakin luas ruang lingkup studi kita maka semakin sulit untuk membuat pertanyaan¹

Sutrisno Hadi menguraikan bahwa;

sekali suatu pokok permasalahan ditetapkan maka langkah berikutnya adalah membatasi luasnya dan membatasi

¹ Joseph Frankel, Hubungan Internasional, Jakarta, 1980, hal 20

formulasi-formulasi yang tegas terhadap pokok persoalan itu.²

Untuk mempermudah pembahasan penulisan ini, penulis membatasi ke dalam dua batasan yaitu batasan-batasan yang antara lain meliputi.

1. Batasan Materi

Karena penulisan ini membahas tentang kebijakan multikultural maka materi dibatasi pada keanekaragaman kultur dan etnis di Australia yang telah dianggap sebagai suatu aset nasional yang berharga yang kemudian mendorong pemerintahnya mengeluarkan kebijakan multikultural, terutama langkah yang telah diambil oleh PM Howard pada masa pemerintahannya. Tetapi dalam penulisan selanjutnya tidak menutup kemungkinan untuk membahas masalah-masalah lain sepanjang relevan dan mendukung pokok permasalahan agar penulisan ini memberikan gambaran yang komprehensif sebagai upaya agar dapat lebih mendekati kesempurnaan.

2. Batasan waktu

Yaitu antara tahun 1996, karena pada saat itu PM John Howard mengeluarkan Toleransi Rasial yang merupakan langkah pertama Howard dalam meneruskan konsep multikultural yang telah dirintis para

² Sutrisno Hadi, Metode Riset, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, hal 8

pendahulunya, sampai dengan tahun 2000, karena pada saat ini Howard masih berkuasa. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan disertakan juga tahun-tahun sebelumnya yang berkaitan dengan masalah tersebut untuk melengkapi bahasan.

1.3. Problematika

Dalam menentukan atau merumuskan suatu permasalahan ada faktor terpenting yang harus dilakukan sebelum kita melakukan penelitian terhadap suatu hal. Rumusan masalah yang jelas dapat mempermudah ditemukannya suatu jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang ada.

Kebijakan Multikultural yang telah dirintis oleh Whitlam dan para penggantinya, kini diteruskan oleh PM John Howard. Howard sangat memperhatikan persatuan Australia. Menuntut Howard persatuan Australia dimaksudkan untuk menjaga stabilisasi negara Australia. Oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah yang konkrit agar kemajemukan yang ada di Australia tidak menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakatnya.

Masyarakat Australia merupakan masyarakat yang dinamis dimana perubahan-perubahan selalu terjadi sepanjang masa. Salah satu yang mempengaruhi perubahan-perubahan tersebut adalah faktor asimilasi. Apabila dua kelompok atau lebih melakukan asimilasi maka garis batas diantara mereka menjadi pudar, yang kemudian melahirkan budaya baru.

Pemerintah Australia perlu mengingat bahwa beberapa tahun yang akan datang akan banyak bermunculan budaya-budaya baru yang tentu saja akan menimbulkan permasalahan apabila tidak segera diantisipasi. Terutama apabila budaya tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Australia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah yang muncul adalah

APA SAJA LANGKAH YANG DIAMBIL JOHN HOWARD SEHUBUNGAN
DENGAN MULTIKULTURAL DI AUSTRALIA PADA MASA
KEPEMIMPINANNYA

1.4. Kerangka Dasar Teori

Teori adalah merupakan sarana deskripsi dan ekspianasi serta merupakan alat yang vital dalam mengumpulkan data disamping sebagai alat analisis data itu sendiri. Teori terdiri atas preposisi yang menjelaskan fenomena generalisasi yang dibuat sebagai awal teori². Fungsi teori adalah sebagai wahana untuk menjelaskan fenomena dan generalisasi yang dibuat sebagai awal teori.

Dengan perumusan masalah tersebut penulis berharap dapat menganalisa dengan mengacu kepada landasan teori yang dianggap

² Mubtir Mar'ud, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, LPSRS, Jakarta, 1994, hal 185

relevan. Untuk membahas problematika mengenai kebijakan pemerintah Australia dalam bidang multikultural maka penulis menggunakan teori nasionalisme.

Dalam tahun 1882 Ernest Renan telah membuka pandangannya tentang faham 'bangsa' itu. bangsa adalah suatu nyawa, suatu azas akal yang terjadi dari dua hal. Pertama rakyat dulunya harus bersama-sama menjalani suatu riwayat, dan kedua rakyat itu harus mempunyai kemauan, keinginan untuk hidup menjadi satu. Bukan jenis, bukan bahasa, bukan agama bukan persamaan tubuh, bukan pula batas-batas negara yang menjadikan 'bangsa' itu.

Penulis lain yang mempelajari tentang 'bangsa' adalah Otto Bauer yang menyatakan bahwa bangsa adalah suatu persatuan perangai yang terjadi dari persatuan hal ihwal yang telah dijalani oleh rakyat.⁴ Bangsa-bangsa merupakan golongan-golongan yang beraneka ragam dan tak terumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa-bangsa itu memiliki faktor-faktor obyektif tertentu yang membuat mereka berbeda dari bangsa-bangsa lain misalnya persamaan keturunan, bahasa, daerah, kesatuan politik, adat dan tradisi atau perasaan agama. Akan tetapi tiada satupun diantara faktor-faktor ini yang hakiki untuk menentukan ada tidaknya atau untuk merumuskan bangsa itu. Maka rakyat Amerika Serikat tidak

⁴ Ir Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Panitia Pembina Jiwa Revolusi, 1959, hal 12.

mensyaratkan bahwa mereka harus seketurunan untuk merupakan suatu bangsa, rakyat Swiss menggunakan tiga atau empat bahasa, namun merupakan bangsa yang tegas pembatas dan kebangsaannya. Meski faktor-faktor obyektif itu penting namun unsur terpenting ialah kemauan bersama yang hidup nyata.² Kemauan inilah yang dinamakan nasionalisme, yakni suatu iktikat, suatu keinsafan rakyat bahwa rakyat itu adalah satu golongan, satu bangsa.

Perjalanan terbentuknya nasionalisme di Australia sangatlah unik. Berbeda dengan negara-negara lain. Seperti kita tahu perjalanan nasionalisme Amerika Serikat dimulai pada saat revolusi kemerdekaan melawan kolonial Inggris pada tahun 1776. Di negara lain seperti di negara-negara Asia mengalami hal yang hampir serupa dengan Amerika.

Akan tetapi perjalanan nasionalisme Australia berbeda dengan proses nasionalisme di negara-negara tersebut. Australia melewati duaratus tahun tanpa terlalu banyak hal-hal kekerasan, dramatis maupun heroik. Australia tidak pernah merupakan tanah patriot, tidak ada perjuangan kemerdekaan, tidak ada revolusi, tidak ada perang saudara, tidak ada peperangan dengan kekuasaan asing pernah dilancarkan di negen sendiri. Perjuangan untuk menundukkan kaum Aborigin telah

² Nasionalisme Arti dan Sejarahnya, Hans Kohn, Erlangga, Jakarta, 1984, hal 11

ditekan secara kolektif dari ingatan rasional.⁶ Pembentukan nasionalisme di Australia dimulai dengan adanya mitos-mitos tentang bangsa Australia, diantaranya adalah mitos tentang Bushman atau pekerja ladang.⁷ Keadaan alam dan kondisi ekonomi Australia pada abad 19 menciptakan mata pencaharian bagi penduduknya. Tanah-tanah di Australia dikerjakan oleh orang-orang yang tidak tetap. Oleh karena itu penduduk Australia pada waktu itu merupakan masyarakat pengembara. Sebagian besar dari mereka adalah laki-laki dan mempunyai usaha bersama yang kuat. Bahaya, kesulitan serta kesepian di dalam hutan membuat hubungan mereka semakin erat.

Kondisi ekonomi dan geografi serta masyarakat yang demikian menimbulkan jiwa persaudaraan yang didasarkan pada solidaritas kelompok, kemakmuran ekonomi, kesetiaan yang kuat pada sesamanya serta menimbulkan pendirian bahwa pekerja ladang merupakan warga Australia yang sebenarnya.

Mitos Pioneer menggambarkan bahwa orang Australia mempunyai keberanian, gigih berusaha, pekerja keras dan terkenal dengan ketekunannya.⁸ Gambaran-gambaran tentang mitos ini sering diaplikasikan oleh orang-orang yang pertama kali mendaratangi Australia,

⁶ Richard H. Chauvel, Yayasan Obor, Jakarta, 1992, hal 202

⁷ Nasionalisme Australia, Pusat Kajian Studi Australia Universitas Indonesia, hal 5

⁸ Ibid, hal 14

sebagai pastor dan petani. Pioneer merupakan legenda nasionalis yang menguraikan pengalaman imigran Eropa di Australia; sebagai penjinak lingkungan baru untuk kepentingan manusia.

Pioneer merupakan sebutan bagi imigran yang pertama datang dan mengolah tanah Australia sekitar tahun 1800-an.

Mitos yang lain adalah mitos tentang Ned Kelly yang dianggap sebagai pahlawan rakyat Australia.⁹ Rakyat Australia menggambarkan Ned Kelly sebagai seseorang yang bersuara nyaring, angkuh, pelanggar hukum serta petualang hutan. Akan tetapi rakyat Australia lebih memandang Ned Kelly sebagai penyamun bangsawan atau Robin Hood daripada sebagai seorang kriminal.

Mitos terakhir adalah adanya ANZAC. Keterlibatan Australia dalam Perang Dunia I merupakan sumber kebanggaan nasional. Kontingen khusus Australia bergabung dengan kontingen New Zealand di Mesir. Gabungan ini disebut ANZAC (Australia and New Zealand Corps). Pada saat Inggris tidak berhasil merebut wilayah Dardanelles dari kekuasaan Turki, namun ANZAC mampu menguasai wilayah tersebut selama 8 bulan. Setelah peristiwa tersebut masyarakat Australia menganggap bahwa mitos ANZAC lebih hebat dari Bushman maupun Pioneer.¹⁰

⁹ *Ibid.*, hal 18

¹⁰ *Australia In Brief*, Department of Foreign Affairs and Trade, Canberra, 1998, hal 26

Pada perkembangan selanjutnya setelah bangsa Asia mulai memasuki Australia, pemerintah Australia mulai menerapkan Kebijakan Australia Putih yang dimaksudkan untuk menjaga Australia berpenduduk kulit putih saja. Akan tetapi kebijakan tersebut dirasa kurang menguntungkan bagi perkembangan negara Australia. Oleh karena itu pada tahun 1972 PM Whitlam memperkenalkan istilah 'multikulturalisme'. Whitlam melihat bahwa keanekaragaman di Australia akan memperkaya keberadaan Australia yang sedang berkembang.¹¹

Menurut Agenda Nasional multikultural merupakan suatu sebutan yang menggambarkan diversifikasi kebudayaan serta etnik di Australia sekarang. Sedangkan PM Fraser memperluas arti multikultural dengan menekankan persamaan hak bagi semua warga Australia, baik pendatang maupun penduduk Australia pada umumnya.¹²

Multikulturalisme didasarkan pada pembentukan masyarakat melalui penghargaan serta pembakuan perbedaan-perbedaan, yang kemudian dileburkan menjadi suatu masyarakat kesatuan nasional.

¹¹ Ratih Hardjono, *Suku Putihnya Asia: Perjalanan Australia Mencari Jati Dirinya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal 108

¹² *Ibid.*, hal 111

1.5 Hipotesis

Hipotesis selalu disertakan dalam suatu penulisan yang mempunyai bobot ilmiah. Kedudukannya adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Sutrisno Hadi, MA sebagai berikut:

Hipotesis adalah suatu dugaan yang mungkin benar, mungkin juga salah. Dia akan ditolak jika salah atau palsu, dan akan diterima jika ada faktor yang membenarkannya. Penolakan dan penerimaan hipotesis dengan begitu sangat tergantung dari fakta-fakta yang dikumpulkan.¹³

Penulis mengajukan hipotesis yang relevan antara permasalahan yang berkembang dengan teori yang dipakai untuk menjawab pertanyaan yang penulis ajukan.

Pada masa kepemimpinan PM John Howard ditetapkan kebijakan toleransi rasial yang isinya antara lain ada'ah warga Australia:

1. menetapkan komitmen akan semua hak-hak semua warga Australia untuk memperoleh persamaan hak, dan diperlakukan dengan perlakuan yang sama tanpa memperhatikan ras, warna kulit, asal-usul dan keyakinan;

¹³ Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1986, hal 19

2. menetapkan komitmen untuk memelihara kebijakan imigrasi tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, keyakinan maupun asal-usul;
3. menetapkan proses rekonsiliasi dengan warga Aborigin dan mengganti keadaan sosial ekonomi yang telah dirugikan
4. Australia merupakan negara dengan berbagai budaya;
5. Menolak segala bentuk perlakuan rasis yang tidak toleran.

Selanjutnya pada tahun 1997 pemerintahan Howard membentuk Badan Penasehat Multikultural Nasional (National Multicultural Advisory Council-NMAC) yang berfungsi sebagai penasehat pemerintah dalam pembuatan kebijakan pemerintah yang menyangkut multikultural.

Langkah-langkah ini akan semakin memperkuat jati diri Australia, terbukti selama ini doktrin multikultural merupakan cara yang cukup berhasil untuk menangani pertentangan-pertentangan potensial masyarakat multi etnis.

1.6 Metode Penelitian

Salah satu syarat dalam penulisan ilmiah adalah mengadakan penelitian. Metode tersebut meliputi teknik pengumpulan data dan teknik menganalisa permasalahan yang dimaksudkan untuk memudahkan perumusan suatu kesimpulan atau pemeriksaan kebenaran.

Dalam penelitian ini melalui 3 tehnik, yaitu tehnik pengumpulan data, tehnik analisa data dan tehnik pendekatan.

1.6.1 Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis melakukan riset perpustakaan. Sumbernya bukan hanya dari buku ilmiah, tetapi juga dari artikel-artikel, surat kabar, majalah dan data-data lain yang menunjang. Sumber-sumber tersebut penulis peroleh dari lembaga-lembaga antara lain:

1. Perpustakaan FISIP Unej
2. Perpustakaan UNEJ
3. Konsulat Australia Denpasar
4. CSIS
5. LIPI

1.6.2 Tehnik Analisa Data

Analisa dilakukan setelah semua data terkumpul. Menurut The Liang Gie

analisa adalah segenap rangkaian pembuatan pikiran yang menelaah sesuatu hal secara mendalam, terutama mempelajari bagian-bagian dari suatu keseluruhan untuk mengetahui suatu ciri-ciri suatu bagian, hubungan satu

sama lain dan peranannya dalam suatu keseluruhan yang bulat.¹⁴

Untuk mendapatkan hasil analisa yang memadai, maka penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Menurut Saifudin Azwar:

metode deduktif merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.¹⁵

Dengan kata lain deduksi adalah menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak berdasarkan generalisasi yang sudah ada.

Kebijakan multikultural yang telah dirintis oleh Whitlam ini diteruskan oleh Howard Langkah pertama yang diambil Howard adalah dengan dikeluarkannya kebijakan Toleransi Rasial pada tahun 1996. Dalam kebijakan ini dinyatakan bahwa Australia merupakan negara dengan berbagai budaya. Selain itu juga dinyatakan tentang persamaan hak semua warga Australia termasuk warga Aborigin.

Langkah berikutnya adalah membentuk NMAC, suatu badan penasihat multikultural nasional pada tahun 1997. NMAC menekankan bahwa beragam budaya merupakan kekuatan pemersatu Australia.

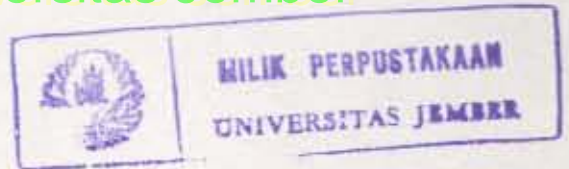
¹⁴ The Liang Gie, Ilmu Politik, Yayasan Studi Ilmu Politik dan Teknologi, Yogyakarta, 1986, hal 65

Dilihat dari kebijakan yang telah dibuatnya Howard memperhatikan persatuan Australia. Bagi Howard multikultural merupakan alat pemersatu Australia.

1.6.3 Pendekatan

Untuk mempertajam analisa diperlukan pendekatan yang membuat penelitian yang spesifik. Dalam penulisan ini digunakan pendekatan budaya dan pendekatan politik. Penggunaan pendekatan budaya dikarenakan masyarakat Australia merupakan masyarakat dengan budaya yang beragam (*culturally diverse society*), sedangkan pendekatan politik dikarenakan kebijakan tersebut dibuat untuk menjaga stabilitasi Australia.

¹² Saifudin Azwar, MA. Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, 1998, hal 40



BAB II

LATAR BELAKANG KEBIJAKAN MULTIKULTURAL AUSTRALIA

2.1. Sejarah Kedatangan Imigran

Benua Australia ditemukan oleh James Cook pada tahun 1770. Cook pada waktu itu melakukan perjalanan ke Tahiti untuk sebuah penelitian astronomi. Ketika misinya selesai, Cook berlayar ke selatan dan menemukan di dekat tanjung Everard pada 20 April 1770 dan mengklaim bahwa daratan tersebut milik Inggris dengan menancapkan bendera Inggris di daratan tersebut.¹

Australia merupakan sebuah benua dengan luas keseluruhan 7.682.30 km dan terletak pada garis 110 BT, 153 BT, 10,41 LU; 43,39 LS. Seluruh wilayah ini dikelilingi oleh laut dan samudra Hindia, di sebelah utara terdapat laut Timor dan laut Arafuru. Sedangkan disebelah timur terdapat laut Coral dan laut Tasman. Australia juga merupakan sebuah benua yang datar, yang lebih dari setengah wilayahnya memiliki ketinggian kurang lebih 300 meter di atas permukaan laut, dan hanya sekitar 5% yang berada di atas ketinggian 600 meter.²

¹ Year Book Australia, Australian Bureau of Statistic, 1999, hal 17

² Ibid, hal 18

Pada mulanya benua Australia merupakan tempat pembuangan para narapidana Inggris. Hal ini dikarenakan meningkatnya kejahatan kriminal di Inggris yang menyebabkan penjara Inggris penuh sesak dengan para tahanan. Kemudian pemerintah Inggris mempunyai gagasan untuk menjadikan benua Australia sebagai tempat pembuangan para narapidana.

Pada awalnya Inggris tidak tertarik dengan Australia. Akan tetapi setelah Inggris kehilangan tanah kolonial Amerika dalam perang kemerdekaan Amerika, Inggris butuh tempat untuk para narapidana tersebut.³ Kemudian dipilihlah benua Australia. Dan pada tahun 1787 Kapten Arthur Philip membawa para tahanan tersebut ke Australia dan baru tiba di daratan Australia satu tahun kemudian.

Beberapa tahun kemudian dirasakan bahwa di Australia kekurangan penduduk wanita karena sebagian besar narapidana adalah kaum laki-laki. Hal ini akan menimbulkan kepunahan penduduk karena tidak adanya regenerasi. Maka pada tahun 1793 imigran bebas mulai diperbolehkan mendarat di Australia. Para imigran diutamakan para wanita. Mereka berasal dari Inggris. Kebanyakan generasi imigran melihat diri mereka sebagai imigran perintis. Sebagai orang yang terasing, komunitas kecil, jauh dari tanah lahir, mereka menggambarkan

³ Year Book Australia 1978, Australian Bureau of Statistic, 1978, hal 9

dirinya dari bagian orang-orang yang hebat dan kuat. Pada dasarnya mereka percaya bahwa kualitas fisik dan sosial mereka mereka berasal dari keturunan ras Inggris, dan mereka berusaha mengembangkan ke'Inggris'an mereka.

Pada masa awal pembentukan Australia sebagai sebuah koloni, masyarakat yang mendiami Australia masih homogen keturunan Inggris. Untuk itu pemerintah Australia kemudian menarik imigran yang berasal dari Inggris untuk bermigrasi ke Australia dengan diberi fasilitas-fasilitas serta kemudahan-kemudahan. Namun pada akhirnya orang Inggris yang mau pindah ke Australia semakin sedikit, sehingga pada akhirnya pemerintah Australia mengizinkan para pendatang Eropa non Inggris untuk memasuki Australia.

Perkembangan selanjutnya adalah ditemukannya tambang emas secara besar-besaran di Australia pada sekitar tahun 1840-an. Masa ini disebut masa Gold Rush, dan pada masa ini para imigran dari Cina mulai berdatangan di Australia sebagai pekerja di pertambangan emas. Namun para imigran Cina ini tidak disukai oleh masyarakat kulit putih. Hal ini dikarenakan ketekunan dan ketelatenan para etnis Cina tersebut dalam bekerja, sehingga timbul kekhawatiran di kalangan masyarakat kulit putih apabila suatu saat mereka akan dikuasai oleh warga kulit berwarna. Ketekunan dan ketelatenan masyarakat Cina ini bisa terlihat antara lain pada

saat mereka mencari emas pada gundukan tanah yang oleh orang lain dibiarkan begitu saja, walaupun mereka hanya mendapatkan segenggam emas saja dalam beberapa gundukan.

Orang-orang Cina merupakan saingan dalam mencari pekerjaan karena mereka mau bekerja lebih lama dengan upah yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pekerja Eropa. Dengan demikian, hal itu akan membahayakan para pekerja Eropa yang telah terbiasa menerima upah lebih tinggi.

Pada 30 Juni 1861 terjadi kerusuhan di Lambing Flat yang menimbulkan orang-orang kulit putih semakin khawatir terhadap pekerja kulit berwarna yang kian bertambah banyak dan dianggap noda dalam masyarakat kolonial yang menganggap dirinya keturunan Inggris tulen.

Pada dasarnya masyarakat kulit putih di Australia yang pada waktu itu adalah keturunan Inggris menolak kedatangan para imigran non Inggris. Akan tetapi akhirnya orang-orang Inggris yang pindah ke Australia semakin sedikit.⁴ Dengan makin berkurangnya perpindahan penduduk dari Inggris, Australia berusaha mencari imigran dari negara Eropa non Inggris. Setelah perang Dunia ke II pemerintah Australia menyatakan bahwa Australia membutuhkan imigran untuk membantu perkembangan industrialisasi dan sumber daya alam. Dua puluh tahun

setelah perang dunia II tercatat sekitar lebih dari 2 juta penduduk Eropa bermigrasi ke Australia. Setengah dari mereka berasal dari Inggris. Yang lainnya berasal dari Austria, Jerman, Yunani, Hongaria, Itali, Polandia dan Yugoslavia⁴. Sebagian dari mereka merupakan pengungsi perang.

Hingga kini sekitar 90% dari penduduk Australia berasal dari Eropa. Sisanya dari etnis Asia, Timur Tengah dan penduduk Asli Aborigin yang kini sebagian besar kebudayaan aslinya sudah punah. Dari seluruh jumlah penduduk kulit putih kurang lebih sekitar 90 % merupakan keturunan Inggris. Sisanya adalah Itali, Yunani, Belanda, Jerman serta Yugoslavia. Sedangkan imigran dari etnis Asia, Cina merupakan kelompok terbesar, kemudian diikuti oleh Vietnam, Filipina, Malaysia dan Indonesia.

2.2. Kebijakan Australia Putih

Sebagian besar pendatang Australia yang berbudaya Eropa merasa sangat terasing tinggal di kawasan yang dikelilingi banyak budaya yang sangat berbeda dengan nilai-nilai mereka sebelumnya. Timbulnya rasa superior dan sikap curiga terhadap bangsa-bangsa Asia, sikap superior atau memandang rendah terhadap bangsa-bangsa Asia disebabkan

⁴ Drs. Ahmad Khayyari MA, Pola Umum Politik Luar Negeri Australia, Fakultas Pascasarjana UGM, 1991, hal 4

² World Book Encyclopedia, Field Enterprises Education Corp, London, 1966, hal 554

karena mayoritas bangsa-bangsa Asia pada waktu itu berada dibawah jajahan Eropa. Sedangkan rasa curiga mulai terbentuk sejak kedatangan bangsa Cina yang mereka anggap sebagai saingan dalam menggali potensi alam Australiakhususnya masalah emas. Pada masa Gold Rush orang-orang Asia tersebut diidentikkan sebagai *yellow peril* atau bahaya kuning.

Hingga pertengahan tahun 1960-an Australia menerapkan kebijakan yang menjaga warganya berkulit putih saja. Kebijakan ini dikenal dengan 'White Australia Policy' atau Kebijakan Australia Putih. Langkah yang diambil pemerintah Australia dalam menerapkan kebijakan ini adalah dengan hanya diterimanya para imigran dari kalangan kulit putih saja (Eropa) terutama Inggris. Sedangkan Imigran Eropa non Inggris dihimbau untuk melepaskan kebudayaan dan bahasa mereka kemudian berasimilasi dengan penduduk Australia pada umumnya yang mempergunakan bahasa dan budaya Inggris. Hal ini dimaksudkan supaya mereka menjadi masyarakat Australia tulen.

Kebijakan Australia Putih merupakan kebijakan imigran yang sifatnya rasis. Sebenarnya sejarah rasisme di Australia dimulai dengan adanya penyrksaan terhadap orang-orang pribumi Aborigin yang dibunuh dengan ditembak dan diracun. Pelaksanaan Kebijakan Australis Putih merupakan manifestasi dari upaya nasional untuk menjaga institusi dan

karakter Inggris, sebuah masyarakat putih yang harus mempertahankan keadaan rasial mereka semurni mungkin agar mereka tetap mendapat pengakuan sebagai bangsa Barat. White Australia Policy didasarkan pada kesadaran rasial. Keinginan untuk terciptanya homogenitas rasial tercermin dalam sikap yang tidak toleran terhadap kulit berwarna dan perasaan bahwa pada hakekatnya kulit berwarna lebih rendah dari kulit putih.

Kebijakan Australia Putih atau disebut juga '*kebijakan batasan imigrasi*' dijadikan sebuah dasar program imigrasi.⁶ Kebijakan ini muncul dari adanya ketakutan akan persaingan antara imigran warga kulit berwarna dan warga kulit putih. Seperti telah dijelaskan diatas bahwa warga kulit putih khawatir akan penguasaan warga asia atas diri mereka, karena orang Asia terkenal dengan kerja kerasnya. Kekhawatiran warga kulit putih ini lebih didasarkan pada image yang sudah terlanjur melekat dalam diri mereka bahwa masyarakat kulit putih mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat kulit berwarna. Oleh karena itu Kebijakan Australia Putih ini mendapat dukungan dari seluruh warga kulit putih Australia.

Namun setelah tahun 1960 disadari bahwa Australia perlu menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga terdekatnya yaitu Asia.

⁶ Encyclopedia of Knowledge, Grolier inc, Connecticut, 1991, hal 224.

2.3 Masa Integrasi

Masa Integrasi merupakan masa-masa dimana para imigran non-Eropa terutama Asia mulai berdatangan ke Australia. Masa integrasi ini terjadi sekitar pertengahan tahun 1960-an hingga tahun 1972. Ketika Pemerintah mengakhiri Kebijakan Australia Putih pada tahun 1966 terjadi penambahan jumlah imigran yang berasal dari Asia dan Timur Tengah.⁶

Walaupun Kebijakan Australia Putih telah dihapus akan tetapi tindakan rasisme masih terjadi di kalangan warga kulit putih Australia. Mereka melakukan seleksi terhadap para imigran. Para imigran diperbolehkan memasuki Australia apabila mempunyai ketrampilan dan kecakapan bahasa Inggris. Hal ini tentu saja menyulitkan para imigran yang tidak mempunyai kecakapan bahasa Inggris termasuk sebagian besar imigran Asia. Pengetesan terhadap para imigran ini dilakukan di dalam sebuah ruangan dan calon imigran langsung masuk satu persatu secara bergantian, sehingga para petugas bisa mengetahui warna kulit para imigran. Dengan demikian hanya sebagian kecil warga kulit berwarna yang diterima di Australia.

Pada awal dekade 1970an pengungsi Vietnam atau kelompok orang-orang perahu tiba di benua Australia yang disebabkan timbulnya

⁶ Collier's Encyclopedia, P.F. Collier, New York, 1993, hal 247

perang saudara yang tengah berkecamuk di kawasan Indocina. Percampuran masyarakat yang terjadi bukan hanya beda dari dimensi kultur tapi juga dari segi etnis. Kedatangan pengungsi Vietnam tersebut disambut dengan dingin dan rasa curiga oleh masyarakat Australia, khususnya generasi tua. Dikhawatirkan para imigran Asia akan merusak kebudayaan Inggris yang mereka banggakan.

Dengan begitu Kebijakan Australia Putih belum sepenuhnya terhapus. Terbukti masih adanya rasis terhadap warga kulit berwarna. Penerimaan imigran di Australia hanya merupakan salah satu usaha untuk memperbaiki hubungan luar negeri Australia dengan negara-negara Asia, karena masa depan keamanan Australia dan kemakmuran ekonominya terkait erat dengan keamanan dan kemakmuran Asia.

Pada dasarnya Australia mempunyai kebijakan terpisah mengenai imigrasi seperti yang diatur dalam hukum Migration Act 1958, yaitu Migration Program dan Humanitarian Program.⁵ Migration Program sifatnya global, sedangkan Humanitarian Program adalah diperuntukkan bagi pendatang dari luar negeri yang berstatus sebagai pengungsi yang ditangani di bawah United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Pada 1998-1999 para imigran jenis ini menempati dua belas ribu

⁵ Fact Sheet no. 2, Australia, A Culturally Diverse Society, Department on Foreign Affairs and Trade, Canberra, 1998.

tempat yang diprioritaskan untuk bekas Republik Yugo, Timur Tengah, Afrika.

2.4 Multikulturalisme

Istilah multikultural pertama kali diperkenalkan oleh PM Gough Whitlam yang terpilih sebagai PM Australia pada tahun 1972. Whitlam merupakan Perdana Australia yang memiliki pemikiran-pemikiran yang cerdas. Ia tak akan segan-segan mengubah kebijakan yang dirasa tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Australia, termasuk diantaranya adalah menghapus asimilasi yang membabi buta dimana para imigran harus meninggalkan budaya dan bahasanya. Menurut Whitlam asimilasi yang demikian sudah tidak sesuai dengan karakter masyarakat Australia yang beragam. Selain itu sistem asimilasi ini akan mempersulit bagi warga etnis Asia dan warga kulit berwarna lainnya untuk beradaptasi dengan masyarakat kulit putih Australia karena perbedaan warna kulit dan budaya. Menurut Whitlam perbedaan yang ada di Australia justru akan semakin merampakkan keberadaan Australia sebagai suatu bangsa yang berdiri sendiri.

Langkah-langkah yang diambil Whitlam dalam merealisasikan kebijakan ini antara lain adalah diberikannya kebebasan bagi tiap-tiap etnis untuk mengekspresikan kebudayaannya.

Kebijakan ini kemudian diikuti oleh pemerintah Hawke. Hawke berharap dengan adanya multikultural maka para imigran dapat berpartisipasi dalam pembangunan Australia. Hawke menilai multikulturalisme merupakan identitas nasional dimana tiap kelompok bebas mengekspresikan budaya mereka sepanjang tidak bertentangan dengan perasaan kesatuan Australia.

Kemudian pada masa kepemimpinan John Howard telah dikeluarkan kebijakan Toleransi Rasial pada tahun 1996 yang isinya mempertegas kebijakan-kebijakan yang diambil para pendahulunya. Adanya kebijakan ini juga didukung oleh pimpinan partai oposisi Kim Beazley.

Kebijakan Toleransi Rasial antara lain berisi tentang persamaan hak bagi semua warga negara Australia untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan ras, warna kulit dan asal usul serta menyatakan bahwa Australia merupakan masyarakat dengan beragam budaya (*culturally diverse society*). Disamping itu juga ditetapkan tentang proses rekonsiliasi dengan masyarakat Aborigin dan penghuni pulau-pulau di Torres Strait, yang dalam kebijakan multikultural sebelumnya hal ini belum ditetapkan.

Pergerakan multikultural dimotivasi oleh keinginan anggotanya supaya tiap-tiap etnis mendapatkan respek. Pendukung pergerakan ini

menegaskan bahwa Australia merupakan suatu negara yang penduduknya terdiri dari berbagai etnis, yang masing-masing etnis pantas menerima persamaan respek dan mempunyai hak untuk mempertahankan eksistensi mereka di Australia.



BAB V

KESIMPULAN

Sejarah mencatat bahwa perjalanan Australia merupakan pengalaman yang unik bagi sebuah bangsa. Sejarah Australia menjadi unik karena sebagai bangsa yang mandiri Australia masih sangat dipengaruhi oleh Inggris. Sejak tahun 1778 saat kedatangan narapidana Inggris pertama kali, Australia tidak hanya dihuni penduduk asli Aborigin saja, tetapi sudah mulai berkembang menjadi masyarakat yang heterogen. Heterogenitas penduduk Australia ini semakin meluas sejak kedatangan imigran Eropa dan Asia yang dikemudian hari melahirkan masyarakat Australia yang multikultur.

Secara geografis Australia sangat dekat dengan benua Asia. Akan tetapi secara psikologis antara bangsa Australia dengan bangsa Asia mempunyai perbedaan yang sangat menyolok. Australia merupakan benua dengan komunitas orang-orang kulit putih, sedangkan Asia merupakan benua yang dihuni oleh orang-orang kulit berwarna. Perbedaan secara psikologis ini sering menjadi hambatan bangsa Australia dalam bergaul dengan bangsa-bangsa Asia. Dalam kurun waktu yang cukup lama bangsa Australia masih berusaha mempertahankan orientasinya ke Inggris. Namun dalam dekade terakhir ini bangsa

Langkah berikutnya adalah membentuk NMAC, suatu badan penasehat multikultural nasional yang merupakan penasehat pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang menyangkut multikultural.

Ternyata multikultural Australia juga memberikan dampak pada tumbuhnya nasionalisme Australia yaitu keinginan untuk menjadi bangsa yang independen. Hal ini seperti yang terdapat dalam Agenda Nasional yang memasukkan unsur-unsur nasionalisme, diantaranya multikultural selalu berdasarkan komitmen semua orang Australia dan mengutamakan persatuan Australia, menerima struktur dasar dan prinsip-prinsip dasar negara Australia, serta meminta tanggungjawab untuk menghormati hak-hak orang lain yang mengekspresikan kebudayaannya dan memberi hak bagi semua warga Australia untuk mencetuskan budaya dan kepercayaannya.

Multikulturalisme telah menumbuhkan nasionalisme di Australia yaitu keinginan untuk menjadi bangsa yang mandiri tanpa dominasi Inggris karena komposisi masyarakat Australia sekarang sudah heterogen. Heterogenitas ini memunculkan identitas tersendiri yang berbeda dari Inggris sehingga semakin menguatkan nasionalisme Australia

DAFTAR PUSTAKA

- A.T. Yarwood, 1967, *Asian Migration to Australia*, Melbourne University Press
- _____, 1996, *Australia In Brief*, Canberra, Department of Foreign Affairs and Trade
- _____, 1993, *Collier's Encyclopedia*, New York, P.F. Collier
- DR. Winarno Surachmad, 1970, *Dasar dan Teknik Riset, Pengantar Metodologi Ilmu*, Bandung, CV Transito
- Drs. Akhmad Khusyairi MA, 1991, *Pola Umum Politik Luar Negeri Australia*, Yogyakarta, Fakultas Pasca Sarjana UGM.
- _____, 1974, *Encyclopedia Americana*, New York, Americana Corp.
- _____, 1991, *Encyclopedia of Knowledge*, Connecticut, Grolier inc.
- Hilman Adil, 1993, *Hubungan Australia Dengan Indonesia 1945-1962*, Jakarta, Djambatan
- Ir. Sukarno, 1998, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jakarta, Panitia Pembina Jiwa Revolusi
- Joseph Frankel, 1980, *Hubungan Internasional*, Jakarta, Djambatan
- Marzuki, 1991, *Metode Riset*, Jakarta, Bagian Penerbitan Universitas Indonesia
- Mohtar Mas'ud, 1994, *Jakarta, Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi*, LP3ES

Myra Willard, 1967, **History of Australia Policy to 1920**, Melbourne University Press

Ratih Hardjono, 1991, **Suku Putihnya Asia; Perjalanan Australia Mencari Jati Dirinya**, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama

Richard H. Chauvel, 1992, **Budaya dan Politik Australia**, Jakarta, Yayasan Obor

Saifudin Azwar, MA., 1998, **Metode Penelitian**, Jakarta, Pustaka Pelajar

Sutrisno Hadi, 1989, **Metode Riset**, Yogyakarta, Andi Offset

Sutrisno Hadi, 1986, **Metode Riset I**, Yogyakarta, Gajah Mada University Press

The Liang Gie, 1986, **Ilmu Politik**, Yogyakarta, Yayasan Studi Ilmu Politik dan Teknologi

_____, 1966, **The World Book Encyclopedia**, London, Field Enterprises Education Corp.

_____, 1990, **Year Book Australia 1990**, Australian Bureau of Statistic

_____, 1978, **Year Book Australia 1978**, Australian Bureau of Statistic

Artikel

Fact Sheet no 2, 1998, **Australia; A Culturally Diverse Society**, Canberra, Department of Foreign Affairs and Trade

Surat Kabar dan Majalah

Kompas, 7 April 2000

Kompas, 17 september 1996

Suara Karya, 4 Maret 1996

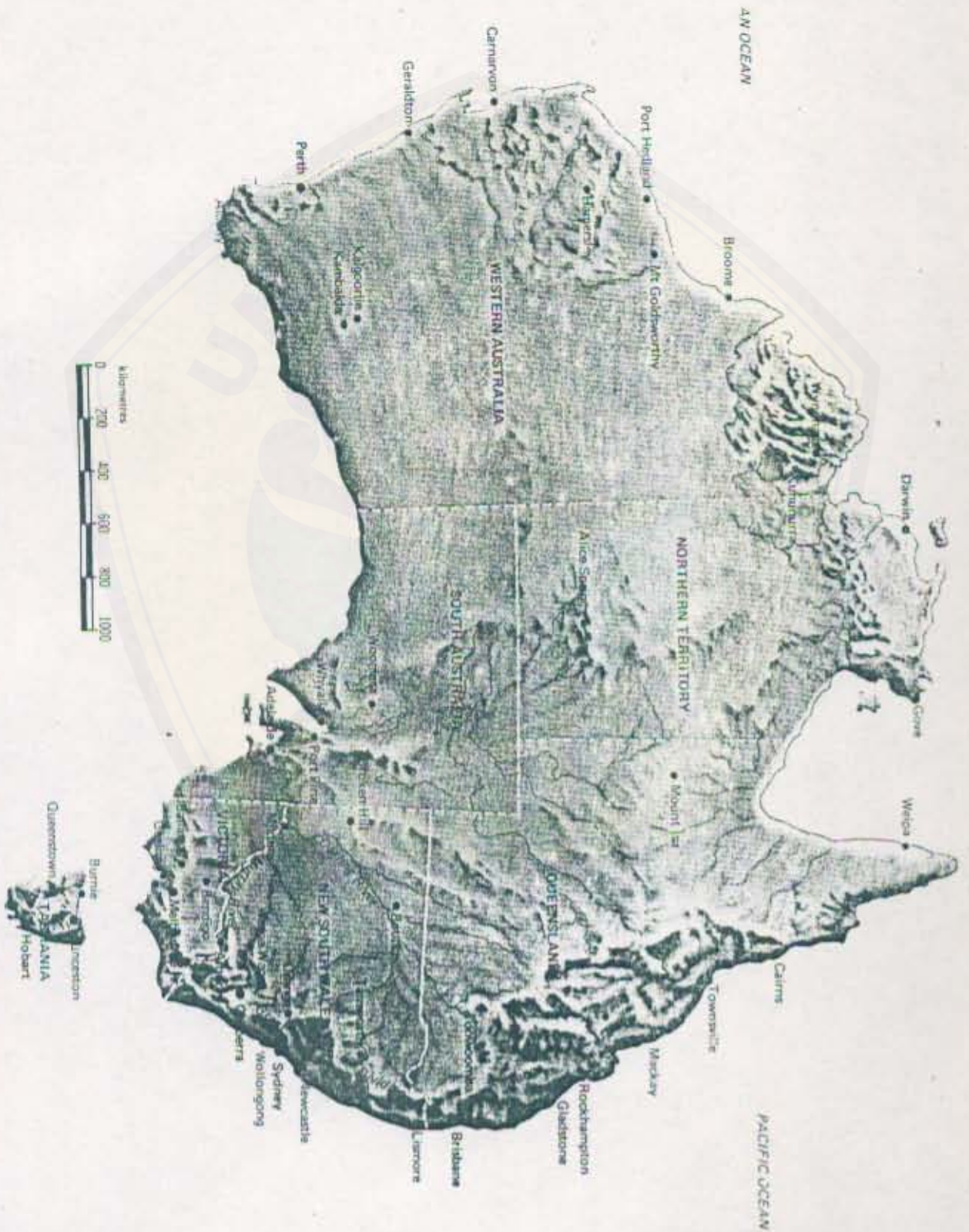
Suara Merdeka, 6 Maret 1996

Suara Merdeka, 16 Maret 1996

Newsweek, 9 Juni 1997

Newsweek, 14 September 1998





Racial Tolerance

On 30 October 1996, the Prime Minister, Mr John Howard, moved a parliamentary statement on racial tolerance, asking that the House of Representatives:

- Reaffirm its commitment to the right of all Australians to enjoy equal rights and be treated with equal respect regardless of race, colour, creed or origin;
- Reaffirm its commitment to maintaining an immigration policy wholly non-discriminatory on grounds of race, colour, creed or origin;
- Reaffirm its commitment to the process of reconciliation with Aboriginal and Torres Strait Islander people, in the context of redressing their profound social and economic disadvantage;
- Reaffirm its commitment to maintain Australia as a culturally diverse, tolerant and open society, united by overriding commitment to our nation, and its democratic institutions and values; and
- Denounce racial intolerance in any form as incompatible with the kind of society we are and want to be.

The Pledge of Commitment

On 26 January each year, Australia Day, thousands of people take the Pledge of Commitment as citizens of the Commonwealth of Australia.

The pledge reads:

From this time forward,

*Under God**

*I pledge my loyalty to Australia and its people,
whose democratic beliefs I share,
whose rights and liberties I respect, and
whose laws I will uphold and obey.*

**People may choose to make the pledge with or without the words 'under God'.*

The Australian Department of Foreign Affairs and Trade